SIAP SIAGA
Australia - Indonesia Partnership for Disaster Risk Management

BNPB

Australian Government

CERITA DAMPAK SIAP SIAGA

Perubahan Pendekatan: Pelokalan Panduan Destana yang Memastikan Bencana Menjadi Urusan Semua Orang

Oktober 2023

PROGRAM SIAP SIAGA

- Program lima tahun (2019-2024) yang **didanai oleh Pemerintah Australia** untuk menguatkan manajemen risiko bencana di Indonesia dan keterlibatan antara Australia dan Indonesia dalam bantuan kemanusiaan di Kawasan Indo-Pasifik.
- **Fokus domestik** untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan diri, merespons, dan memulihkan diri dari bencana yang terjadi secara cepat dan lambat.
- **Fokus regional** untuk memperkuat kerja sama di antara Australia dan Indonesia dalam isu-isu kemanusiaan regional.
- Mendukung **prioritas Pemerintah Indonesia terkait penanggulangan bencana** di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2019-2024) dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045.
- Bermitra dengan masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana, sejalan dengan **pendekatan pentahelix** Pemerintah Indonesia.

SIAP SIAGA mengimplementasikan **sistem perubahan pendekatan untuk meningkatkan keterpaduan kebijakan dan kejelasan peran** pada sektor penanggulangan bencana di Indonesia, dengan membangun hasil yang mumpuni berdasarkan investasi sebelumnya di sektor ini selama 15 tahun terakhir.

Program ini bekerja sama dengan, dan memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk **memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan** yang ada serta menggunakan kegiatan dan program yang sedang berjalan, jaringan, dan sumber daya, untuk membangun koherensi di seluruh sistem dengan meningkatkan koordinasi, pembelajaran sejawat, dan kolaborasi.

Capaian Akhir Program 2 menyatakan bahwa **provinsi, kabupaten, dan desa-desa sasaran dapat lebih mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi, mencegah, merespons, dan pulih dari bencana.** Capaian ini diarahkan untuk memperkuat ketangguhan lokal yang sejalan dengan tujuan BNPB untuk memastikan ketangguhan bencana di tingkat desa/masyarakat. SIAP SIAGA telah bekerja sama dengan pemerintah provinsi NTB untuk mendukung percepatan implementasi Destana dalam rangka memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2018-2023) dan meningkatkan ketangguhan masyarakat NTB terhadap bencana.

MEMPERCEPAT IMPLEMENTASI DESTANA
BENCANA ADALAH URUSAN SEMUA ORANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB (2018-2023) memuat prioritas "NTB yang Tangguh dan Stabil", yang secara eksplisit menyatakan target pembentukan 434 desa Destana pada akhir tahun 2023. Pada akhir tahun 2022, hanya 301 Destana yang telah terbentuk, sebagai akibat dari beberapa faktor, termasuk gangguan pada pelaksanaan Destana karena COVID-19. SIAP SIAGA telah bekerja sama dengan pemerintah untuk mengidentifikasi strategi yang paling tepat untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan mempercepat implementasi Destana di provinsi ini agar dapat memenuhi targetnya.

Tantangan

- Asumsi bahwa Destana adalah tanggung jawab BPBD, sementara banyak mitra lain (pemerintah dan non-pemerintah) yang melaksanakan program PBBPB sesuai dengan Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2012 dan SNI 8357:2013 tentang Penyelenggaraan Destana
- Ketersediaan anggaran yang minim (alokasi anggaran tahunan BPBD rata-rata hanya cukup untuk 10 Destana)
- Kesenjangan kapasitas di dalam pemerintah desa untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan desa
- Kurangnya koordinasi antara lembaga sektoral yang melaksanakan program ketangguhan desa
- Ketergantungan pemerintah desa pada pihak eksternal (masyarakat sipil dan mitra pembangunan lainnya) untuk melaksanakan program ketangguhan bencana
- Kesenjangan dalam pengawasan Destana oleh pemerintah kabupaten, yang mengakibatkan kesenjangan dalam data yang dapat diverifikasi tentang program-program ketangguhan desa.

Titik Balik

Dengan fasilitasi SIAP SIAGA, Bappeda NTB berinisiatif untuk memberikan arahan lintas sektoral untuk mempercepat pelaksanaan Destana agar dapat memenuhi target provinsi. Bappeda membentuk Tim Perumus Pedoman Pelaksanaan Destana dengan target dan jadwal yang jelas, yang terdiri dari beberapa lembaga pemerintah serta anggota Forum PRB termasuk KONSEPSI, Mitra Samya, Koslata, dan Universitas Mataram. Pendekatan pentahelix dalam penyusunan pedoman ini merupakan langkah penting dalam mendorong pergeseran pendekatan dari "penanggulangan bencana adalah urusan BPBD" menjadi "penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama". Pedoman akhir diformalkan dalam Peraturan Gubernur No. 84/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

PEDOMAN DESTANA PERCEPATAN MELALUI PENDEKATAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN

Bappeda NTB membentuk Tim Penyusun Pedoman Destana	Proses klarifikasi peran di antara para aktor pemerintah mengarah pada inisiatif Bappeda untuk meningkatkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan Destana.
Pendekatan berbagai pemangku kepentingan untuk implementasi Destana disepakati	Keterlibatan mitra lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam penyusunan Pedoman Pelaksanaan Destana menjadi dasar pergeseran pendekatan ke arah 'bencana adalah urusan semua orang' dan memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya dari para pelaku non-pemerintah setempat.
Peraturan Gubernur No. 84/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Pengesahan Pedoman ini memberikan keterpaduan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Destana, serta memastikan keselarasan dengan peraturan dan standar nasional.
Peningkatan kapasitas BPBD NTB dan Forum PRB dalam implementasi dan pemantauan Destana	Dengan Bappeda memimpin dalam pengembangan pedoman, BPBD menargetkan kapasitas internal untuk memimpin pemantauan pelaksanaan Destana di seluruh kelompok pemangku kepentingan.
Penyelarasan rencana kerja lintas sektor untuk meningkatkan pengukuran dan pemantauan Destana	Mengatasi tantangan utama dalam program ketangguhan lokal, penyelarasan rencana kerja sektoral dan non-pemerintah dalam Destana dan proyek-proyek serupa memberikan dasar bagi koordinasi pelaksanaan yang lebih efektif, pemantauan hasil yang lebih baik, dan perencanaan tindak lanjut.

"Dengan semangat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan melalui upaya bersama dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi NTB berharap seluruh desa menerapkan/menjadi Destana, dengan pemerintah memprioritaskan pendampingan pada desa-desa yang memiliki risiko bencana yang tinggi. Strategi Percepatan Destana telah membantu memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kinerja dan sinergi semua pihak untuk mewujudkan Destana sebagai sebuah gerakan bersama."

(Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., Kepala Bappeda Provinsi NTB)

DAMPAK YANG MUNCUL PERUBAHAN SISTEM

Klarifikasi Peran

Bappeda NTB mengambil **inisiatif dan peran** untuk memberikan arahan tentang percepatan implementasi Destana. Bappeda membentuk Tim Perumus Pedoman Pelaksanaan Destana yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dengan target dan jadwal yang jelas yang diformalkan melalui Keputusan Kepala Bappeda No. 194/2022 tentang Pembentukan Tim Perumus Pedoman Pelaksanaan Destana Provinsi NTB.

Keterpaduan Kebijakan

Peraturan Gubernur No. 84/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana diterbitkan dengan maksud untuk memberikan **panduan payung/menyeluruh** bagi para pelaku lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Destana, berdasarkan peraturan dan pedoman nasional, dan memungkinkan koordinasi kegiatan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi kemajuan dan standar Destana.

Perencanaan Terkoordinasi

Rencana kerja sektoral diselaraskan, termasuk rencana kerja para aktor dalam Forum PRB, untuk meningkatkan **koordinasi pelaksanaan Destana di NTB,** serta menyediakan data dasar untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil Destana.

Apa selanjutnya:

Kualitas program Destana dapat lebih diperkuat dengan penerapan alat penilaian ketangguhan lokal khusus, seperti Penilaian Ketangguhan Desa dan pemantauan menggunakan standar nasional. Perangkat ini dapat digunakan oleh kementerian lain yang memiliki program serupa dengan Destana, termasuk KSB dan Proklim, yang akan meningkatkan basis bukti tentang ketangguhan desa serta memberikan masukan untuk perencanaan dan penganggaran desa untuk penanggulangan bencana.

SEBELUM

Implementasi Destana di NTB berjalan sangat lambat karena anggaran yang tidak mencukupi, persepsi bahwa Destana adalah tanggung jawab BPBD saja, dan lemahnya koordinasi antara aktor-aktor sektoral dan non-pemerintah yang juga mengimplementasikan Destana atau program-program ketangguhan lokal serupa.

PERAN SIAP SIAGA

- PENILAIAN SISTEM
- FASILITASI
- MENDUKUNG PEMBELAJARAN
- BANTUAN TEKNIS STRATEGIS

SETELAH

Pendekatan lintas sektor dalam mengembangkan Pedoman Pelaksanaan Destana telah membantu mengubah pemahaman bahwa tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga melibatkan aktor lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Peraturan Gubernur No. 84/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana telah diterbitkan, yang memberikan payung hukum untuk perencanaan dan pemantauan Destana di NTB.

Penyelarasan rencana kerja lintas sektor untuk Destana telah mendukung lingkungan yang memungkinkan untuk koordinasi dan pemantauan yang lebih efektif terhadap program-program Destana di NTB.

TERIMA KASIH